



**PERATURAN KEPALA DESA SUMORAME**  
**KECAMATAN : CANDI**  
**KABUPATEN : SIDOARJO**

**NOMOR : 08 TAHUN 2025**



**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**



KEPALA DESA SUMORAME  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SUMORAME  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMORAME  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMORAME

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 12 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);

- 19 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 62);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa.( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
- 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);  
Peraturan
- 28 Peraturan Desa Sumorame Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumorame Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Sumorame Tahun 2022 Nomor 4);
- 29 Peraturan Desa Sumorame Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumorame Tahun 2025 (Lembaran Desa Sumorame Tahun 2024 Nomor 4).
- 30 Peraturan Desa Sumorame Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMORAME  
Dan  
KEPALA DESA SUMORAME

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMORAME TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMORAME Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2,890,447,204.00
2. Belanja Desa	Rp	2,743,944,715.34
Surplus/Defisit	Rp	146,502,488.66
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87,163,893.60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	233,666,382.26
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(146,502,488.66)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMORAME.

Ditetapkan di : Sumorame  
Pada tanggal : 30 December 2025



KEPALA DESA,  
  
ROCHMANU

Diundangkan di : Sumorame  
Pada tanggal : 30 December 2025  
SEKRETARIS DESA



MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN

LEMBARAN DESA SUMORAME NOMOR 08 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMORAME  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	303.790.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.586.657.204,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.890.447.204,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	791.160.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.289.214.551,34	
5.3.	Belanja Modal	448.570.164,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	215.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.743.944.715,34</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>146.502.488,66</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	87.163.893,60	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	87.163.893,60	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	233.666.382,26	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	233.666.382,26	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(146.502.488,66)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SUMORAME, 30 December 2025  
 KEPALA DESA  
  
 ROCHMANU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMORAME  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDDes : APBDDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	303.790.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	2.586.657.204,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.890.447.204,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.489.821.470,35</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.119.914.612,58</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	127.780.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	127.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	589.780.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	589.780.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	275.701.194,58	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.701.194,58	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.600.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.853.418,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.853.418,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>207.780.767,27</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	60.435.067,27	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.190.403,27	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.244.664,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	147.345.700,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.345.700,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>82.350.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.100.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	26.450.000,00	DOS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.250.000,00	DOS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	22.950.000,00	PAD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DOS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.600.000,00	PBH
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>79.576.090,50</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	79.576.090,50	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	79.576.090,50	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>757.637.438,99</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>27.705.806,00</b>	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	27.705.806,00	DOS, PAD
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.705.806,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>283.184.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	199.984.000,00	DOS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	199.984.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.900.000,00	DOS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	59.300.000,00	DOS
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	59.300.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>406.747.632,99</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	400.580.500,00	DOS
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.255.000,00	
2.3.05	5.3	Belanja Modal	387.325.500,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6.167.132,99	PAD, PBK
2.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.167.132,99	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DOS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.000.000,00	DOS
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>250.485.806,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.235.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10.000.000,00	DDS
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	13.235.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.235.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	164.550.806,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	135.750.806,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.750.806,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	28.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	42.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.200.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>21.200.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.200.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengginglingan)	6.200.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>215.000.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.743.944.715,34</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>146.502.488,66</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	87.163.893,60	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	233.666.382,25	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(146.502.488,66)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


 SUMORAME, 30 December 2025  
 KEPALA DESA  
  
 ROCHMANU

## BERITA ACARA

Rapat Pemerintah Desa Sumorame dan BPD pada hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2025 dengan agenda Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026 dengan catatan sebagai berikut :

- I. Peserta Rapat  
Rapat dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Ketua BPD beserta Anggotanya.
- II. Acara dan jalannya rapat
  - a. Rapat dibuka pada pukul 20.00 Wib oleh Pimpinan Rapat
  - b. Sambutan Kepala Desa Sumorame tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026
  - c. Pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026
  - d. Pembahasan  
Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan seperlunya oleh BPD berhasil disepakati bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :
    1. Jumlah Pendapatan Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp 2.890.447.204,00**
    2. Jumlah Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 2.743.944.715,34**
    3. SILPA tahun sebelumnya sebesar **Rp. 87.163.893,60**
    4. Pengeluaran Pembiayaan **Rp. 233.666.382,26**
  - e. Kesimpulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026
- III. Hasil Rapat
  - a. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa Sumorame kepada BPD, disetujui oleh Ketua BPD beserta Anggotanya.
  - b. Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumorame Tahun Anggaran 2026 disetujui oleh BPD kemudian disahkan oleh Kepala Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Mengetahui :

**KETUA BPD DESA SUMORAME**



**KEPALA DESA SUMORAME**



# DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
 Tanggal : 30 Desember 2025  
 Jam : 19.30 Wib.  
 Acara : Penetapan Peraturan Desa nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2026

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ROCHMANU	KEPALA DESA	1	
2	M ZAINUL ARIFIN	SEKRETARIS DESA		2 
3	ENDANG NOER ANISAH	KAUR KEUANGAN	3 	
4	WARSONO	KAUR PERENCANAAN		4
5	BAGUS INDRA KURNIAWAN	KAUR TU & UMUM	5 	
6	IMAM SYAFII	KASI PEMERINTAHAN		6 
7	RITA DJULIANA	KASI PELAYANAN	7	
8	MUJIB RIDUWAN	KASI KESRA		8 
9	JEMAUN	KASUN SUMOTUWO	9 	
10	ABDUL ROCHIM	KASUN KERAMEAN		10 
11	FATHUR ROHMAN	KETUA	11 	
12	MACHFUT, S.T	SEKRETARIS		12 
13	HARUN ISWANDI	KETUA BIDANG	13 	
14	SUYANTO	KETUA BIDANG		14 
15	RP.DELLY JAYA SOEWITO	ANGGOTA	15 	
16	LILIK SURIYANI	ANGGOTA		16 

Sidoarjo, 30 Desember 2025

Mengetahui:

  
**KETUA BPD**  
**FATHUR ROHMAN**

  
**KEPALA DESA SUMORAME**  
**ROCHMANU**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN CANDI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMORAME**  
Jl.Singokarso No. 1 Desa Sumorame, Candi Sidoarjo 61271

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMORAME**  
**NOMOR : 005 /BPD/ 2025**  
**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SUMORAME TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMORAME**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan Akuntabilitas pelaporan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia nomor 5539), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia nomor 5694);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 8);
  7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun

2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);

8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12); sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 72);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa.
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67);
16. Peraturan Desa Sumorame Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumorame Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Sumorame Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Sumorame Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumorame Tahun 2025 (Lembaran Desa Sumorame Tahun 2024 Nomor 4).

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Paripurna BPD Tanggal 28 Desember 2025

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

## DAFTAR HADIR

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumorame membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. Hari Minggu, 28 Desember 2025

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	FATHUR ROHMAN	KETUA		1 
2	MACHFUT, S.T	SEKRETARIS	2 	
3	HARUN ISWANDI	KETUA BIDANG		3 
4	SUYANTO	KETUA BIDANG	4 	
5	RP.DELLY JAYA SOEWITO	ANGGOTA		5 
6	LILIK SURIYANI	ANGGOTA	6 	

Sidoarjo, 28 Nopember 2025

Mengetahui :

**KETUA BPD**



**FATHUR ROHMAN**

- KEDUA** : Apabila dalam Keputusan ini ada kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan kembali.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumorame  
pada tanggal : 28 Desember 2025





**KEPALA DESA SUMORAME  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMORAME  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMORAME  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMORAME**

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :**
- 1** Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2** Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 3** Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 12 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);

- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 19 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);

- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 62);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa.( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
- 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);  
Peraturan
- 28 Peraturan Desa Sumorame Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumorame Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Sumorame Tahun 2022 Nomor 4);
- 29 Peraturan Desa Sumorame Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumorame Tahun 2025 (Lembaran Desa Sumorame Tahun 2024 Nomor 4).
- 30 Peraturan Desa Sumorame Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMORAME TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :**

<b>1. Pendapatan Desa</b>		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	303,790,000.00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2,586,657,204.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0.00
Jumlah Pendapatan	Rp	2,890,447,204.00
<b>2. Belanja Desa</b>		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1,489,621,470.35
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	767,637,438.99
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	250,485,806.00



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMORAME  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa				303.790.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa				2.490.000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes				2.490.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa				295.300.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa				116.300.000,00	
4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa				179.000.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				6.000.000,00	
4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer				<b>2.688.857.204,00</b>	
4.2.1.	Dana Desa				1.473.457.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa				1.473.457.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				673.218.850,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				673.218.850,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				439.981.316,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa				439.981.316,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain				0,00	
4.3.6.	Bunga Bank				0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank				0,00	
5.	<b>BELANJA</b>				<b>2.990.447.204,00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.489.621.470,35	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa			1.119.914.612,58	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	127.790.000,00	ADD, PAD, PSB
1.01.01.	Belanja Pegawai			127.790.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			127.790.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			42.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.01.	Uang Makan			5.290.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			589.790.000,00	ADD, PAD, PSB
1.01.02.	Belanja Pegawai			589.790.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			589.790.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			319.200.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa			63.840.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Keluarga			31.920.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			114.000.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			13.300.000,00	
1.01.02.	Uang Makan			47.520.000,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			275.701.194,58	ADD, PAD, PSB
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			275.701.194,58	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan			72.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			14.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lis Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			17.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00	

Printed by Siskeudas 31/12/2025 1:11:20 PM

Nuamhan 2

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.04	5.2.1.06			32.000.000,00	
1.01.04	5.2.1.09			6.000.000,00	
1.01.04	5.2.2.			100.800.000,00	
1.01.04	5.2.2.02			24.000.000,00	
1.01.04	5.2.2.05			25.200.000,00	
1.01.04	5.2.2.06			51.600.000,00	
1.01.04	5.2.3.			45.000.000,00	
1.01.04	5.2.3.01			10.000.000,00	
1.01.04	5.2.3.02			35.000.000,00	
1.01.04	5.2.5.			57.901.194,58	
1.01.04	5.2.5.01			39.000.000,00	
1.01.04	5.2.5.03			1.440.000,00	
1.01.04	5.2.5.05			10.200.000,00	
1.01.04	5.2.5.07			7.261.194,58	
1.01.05	5.1.	10	bulan	0,00	ADD, PAD, PBH
1.01.05	5.1.4.			73.600.000,00	
1.01.05	5.1.4.01			73.600.000,00	
1.01.05	5.1.4.02			69.000.000,00	
1.01.06	5.2.			4.600.000,00	PBH
1.01.06	5.2.1.			8.853.418,00	
1.01.06	5.2.1.01			8.853.418,00	
1.01.06	5.2.1.06			1.503.418,00	
1.01.08	5.2.1.06	1	Tahun	7.350.000,00	DDS
1.01.08	5.2.1.06			44.200.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.200.000,00	
1.01.06.5.2.1.	Belanja Barang Perengakaian			27.652.450,00	
1.01.06.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.652.450,00	
1.01.06.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.01.06.5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00	
1.01.06.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.547.550,00	
1.01.06.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengakaian			5.547.550,00	
1.01.06.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
1.01.06.5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.000.000,00	
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			207.750.797,27	
1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			60.435.067,27	DLL. PAD. PBH
1.02.01.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.190.403,27	
1.02.01.5.2.1.	Belanja Barang Perengakaian			6.690.403,27	
1.02.01.5.2.1.02	Belanja Perengakaian Alat-alat Listrik			1.500.000,00	
1.02.01.5.2.1.03	Belanja Perengakaian Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			5.190.403,27	
1.02.01.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			17.500.000,00	
1.02.01.5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			9.500.000,00	
1.02.01.5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			8.000.000,00	
1.02.01.5.3.	Belanja Modal			36.244.684,00	
1.02.01.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			36.244.684,00	
1.02.01.5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Meubelair dan Aksesoris Ruangan			18.835.000,00	
1.02.01.5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			17.409.684,00	
1.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa			147.345.700,00	DDS
1.02.03.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			147.345.700,00	
1.02.03.5.2.1.	Belanja Barang Perengakaian			102.810.700,00	
1.02.03.5.2.1.07	Belanja Bahan Material	1	Tahun	102.810.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.100.000,00		
1.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		900.000,00		
1.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.200.000,00		
1.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		3.085.000,00		
1.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		3.085.000,00		
1.02.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		36.350.000,00		
1.02.03.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan		36.350.000,00		
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		82.350.000,00		
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	3.100.000,00	Paket	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.100.000,00		
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.200.000,00		
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.200.000,00		
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		900.000,00		
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		900.000,00		
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musodus, rebug desa Non Reguler)	1	26.450.000,00	Paket	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		26.450.000,00		
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		21.450.000,00		
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.200.000,00		
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		20.250.000,00		
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.000.000,00		
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		5.000.000,00		
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1	11.250.000,00	Paket	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.250.000,00		
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.250.000,00		
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00		
1.04.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00		
1.04.03.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00		
1.04.03.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.000.000,00		
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		1	22.990.000,00	Paket	PAD
1.04.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.990.000,00		
1.04.04.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			6.150.000,00		
1.04.04.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00		
1.04.04.5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.950.000,00		
1.04.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00		
1.04.04.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00		
1.04.04.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			13.300.000,00		
1.04.04.5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			13.300.000,00		
1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa		1	15.000.000,00	Tahun	CDS
1.04.08.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00		
1.04.08.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			5.000.000,00		
1.04.08.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00		
1.04.08.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.000.000,00		
1.04.08.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.000.000,00		
1.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD		1	3.800.000,00	Paket	PBM
1.04.10.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.800.000,00		
1.04.10.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.100.000,00		
1.04.10.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00		
1.04.10.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.950.000,00		
1.04.10.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.300.000,00		
1.04.10.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.10.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			200.000,00	
1.04.10.5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			200.000,00	
01.05.	Sub Bidang Perumahan			79.576.090,50	PBH
1.05.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			79.576.090,50	
1.05.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			79.576.090,50	
1.05.06.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05.06.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.05.06.5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.500.000,00	
1.05.06.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.365.000,00	
1.05.06.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.365.000,00	
1.05.06.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			40.211.090,50	
1.05.06.5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.500.000,00	
1.05.06.5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			31.711.090,50	
1.05.06.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
1.05.06.5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			15.000.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			787.637.438,99	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			27.705.806,00	
2.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	tok	27.705.806,00	DDS, PAD
2.01.03.5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
2.01.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.705.806,00	
2.01.03.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			320.000,00	
2.01.03.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.01.03.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.830.806,00	
2.01.03.5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.01.03.5.2.1.09	Belanja Pakailan Dinas/Seragam/Atribut			4.585.806,00	
2.01.03.5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAH/OUTPUT		ANGGARAN	JUMLAH DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.01.03	Belanja Jasa Honorarium			8.725.000,00	
2.01.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.225.000,00	
2.01.03	Belanja Jasa Usang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.01.03	Belanja Perjalanan Dinas			650.000,00	
2.01.03	Belanja Bantuan Transport			650.000,00	
2.01.03	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	
2.01.03	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.500.000,00	
02.02	Sub Bidang Kesehatan			203.184.000,00	
2.02.02	Penyelenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insendf)			199.984.000,00	DDG
2.02.02	Belanja Barang dan Jasa			199.984.000,00	
2.02.02	Belanja Barang Perlengkapan			147.184.000,00	
2.02.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			147.184.000,00	
2.02.02	Belanja Jasa Honorarium			52.800.000,00	
2.02.02	Belanja Jasa Honorarium Petugas			52.800.000,00	DDG
2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			23.900.000,00	
2.02.04	Belanja Barang dan Jasa			23.900.000,00	
2.02.04	Belanja Barang Perlengkapan			19.900.000,00	
2.02.04	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.700.000,00	
2.02.04	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.200.000,00	
2.02.04	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00	
2.02.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
2.02.04	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
2.02.90	Penyelenggaraan Senam Desa	1	Paket	59.300.000,00	DDG
2.02.90	Belanja Barang dan Jasa			59.300.000,00	
2.02.90	Belanja Barang Perlengkapan			47.000.000,00	
2.02.90	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			47.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	JUMLAH DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.02.90.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.500.000,00	
2.02.90.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.500.000,00	
2.02.90.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.800.000,00	
2.02.90.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			5.800.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			408.747.832,99	
2.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	Paket	400.000.000,00	DCIS
2.03.05.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.255.000,00	
2.03.05.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.800.000,00	
2.03.05.5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
2.03.05.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.100.000,00	
2.03.05.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.455.000,00	
2.03.05.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			5.455.000,00	
2.03.05.5.3.	Belanja Modal			387.325.000,00	
2.03.05.5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			387.325.000,00	
2.03.05.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			122.893.000,00	
2.03.05.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			264.432.000,00	
2.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	Paket	6.167.132,99	PAU, PMS
2.03.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.167.132,99	
2.03.06.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.167.132,99	
2.03.06.5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			4.398.479,99	
2.03.06.5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			1.790.656,00	
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			20.000.000,00	
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Paket	20.000.000,00	DCIS
2.04.01.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
2.04.01.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
2.04.01.5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
02.05.	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup			30.000.000,00	
2.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	Paket	30.000.000,00	DDS
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.05.02.	Belanja Barang Perencanaan			5.000.000,00	
2.05.02.	Belanja Bahan Material			5.000.000,00	
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
2.05.02.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			250.485.806,00	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			23.235.000,00	
3.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1	Paket	10.000.000,00	DDS
3.01.06.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.01.06.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
3.01.06.	Belanja Kursus Pelatihan			10.000.000,00	
3.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	1	paket	13.235.000,00	DDS
3.01.07.	Belanja Barang dan Jasa			13.235.000,00	
3.01.07.	Belanja Barang Perengkapan			8.435.000,00	
3.01.07.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			135.000,00	
3.01.07.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.300.000,00	
3.01.07.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00	
3.01.07.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
3.01.07.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.550.000,00	
3.01.07.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.250.000,00	
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			164.550.806,00	
3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			135.750.806,00	PBH
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			135.750.806,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
3.02.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			109.430.000,00	
3.02.03.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			3.300.000,00	
3.02.03.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			48.130.000,00	
3.02.03.5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			30.000.000,00	
3.02.03.5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa /			28.000.000,00	
3.02.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.02.03.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.500.000,00	
3.02.03.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			22.250.000,00	
3.02.03.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			22.250.000,00	
3.02.03.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.570.805,00	
3.02.03.5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			1.570.805,00	
3.02.90.	Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	1	Tahun	28.800.000,00	PBH
3.02.90.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.800.000,00	
3.02.90.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.800.000,00	
3.02.90.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			28.800.000,00	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			42.500.000,00	
3.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1	Paket	5.000.000,00	DCS
3.03.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.03.04.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
3.03.04.5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			5.000.000,00	
3.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	Paket	25.000.000,00	DCS
3.03.05.5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
3.03.05.5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			25.000.000,00	
3.03.05.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			7.000.000,00	
3.03.05.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
3.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			12.500.000,00	PSH
3.03.06.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			12.500.000,00	
3.03.06.	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan			8.300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.800.000,00	
3.03.06.	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.200.000,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			20.200.000,00	
3.04.03.	Pembinaan PKK			20.200.000,00	PSH
3.04.03.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			20.200.000,00	
3.04.03.	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan			18.700.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.200.000,00	
3.04.03.	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			21.200.000,00	
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			21.200.000,00	
4.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)		1	6.200.000,00	DCS
4.02.01.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			6.200.000,00	
4.02.01.	5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.200.000,00	
4.02.01.	5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Perlitan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas		1	6.200.000,00	DCS
4.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			15.000.000,00	
4.02.04.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6. Belanja Pemeliharaan			15.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6.07. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			15.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			215.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
5.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana		1	Paket	20.000.000,00	DDG
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				20.000.000,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				20.000.000,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				20.000.000,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat					
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat		1	Paket	15.000.000,00	DDG
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak					
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak		1	Paket	180.000.000,00	DDG
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				180.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				180.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				180.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>2.743.944.715,34</b>	
	<b>SURPLUS DEFISIT</b>				<b>146.502.488,86</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				87.163.893,80	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				87.163.893,80	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya				87.163.893,80	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				233.666.382,26	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa				233.666.382,26	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa				233.666.382,26	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				<b>146.502.488,86</b>	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SUMORAME, 30 December 2025

KEPALA DESA

ROO-IMANU

